



MEMBANGUN KOLABORASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



Dr. Febrianty, S.E., M.Si.
Dr. Dany Amrul Ichdan, S.E., M.Sc.
I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D.
Zakky Zamrudi, S.AB., M.AB.
Ardik Praharjo, S.AB., M.AB.

**MEMBANGUN KOLABORASI DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

MEMBANGUN KOLABORASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.

Dr. Dany Amrul Ichdan, S.E., M.Sc.

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D.

Zakky Zamrudi, S.AB., M.AB.

Ardik Praharjo, S.AB., M.AB.



MEMBANGUN KOLABORASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Penulis:

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.
Dr. Dany Amrul Ichdan, S.E., M.Sc.
I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D.
Zakky Zamrudi, S.AB., M.AB.
Ardik Praharjo, S.AB., M.AB.

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Agustus 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 15,5 x 23 cm
ISBN : -

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata yang telah memberi penulis banyak nikmat dan karunia yang tidak dapat dihitung. Terima kasih atas kemurahan hati ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku “Membangun Kolaborasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Paradigma tata kelola pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan selama era yang sangat dinamis dan rumit. Melihat pemerintah sebagai satu-satunya organisasi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak lagi cukup. Sebaliknya, kerja sama antar berbagai pihak dan sektor sangat penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masalah yang dihadapi suatu negara.

Dalam hal ini, artikel ini membantu kita memahami pentingnya kerja sama antara sektor swasta, pemerintah, masyarakat sipil, dan akademis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Kerja sama lintas sektor dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Ini lebih dari sekadar gagasan. Untuk mengatasi berbagai masalah, seperti lingkungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan, orang dapat bekerja sama dan menggabungkan berbagai sumber daya, keahlian, dan perspektif.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya kerja sama ini memiliki tantangan dan komplikasi tersendiri. Seringkali, hambatan yang harus diatasi adalah perbedaan visi, misi, dan kepentingan antar sektor. Oleh karena itu, koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting dalam proses

kolaborasi. Dalam artikel ini, kami akan memeriksa berbagai metode, praktik terbaik, dan studi kasus untuk menunjukkan cara efektif untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis kerja sama.

Akhir kata, harapannya adalah bahwa tulisan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menciptakan pola pikir baru dalam tata kelola pemerintahan, di mana orang-orang dari berbagai sektor dan tingkatan harus terlibat. Kolaborasi antar pihak dan sektor tidak hanya membantu memecahkan masalah tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan berkelanjutan suatu negara. Semoga artikel ini menginspirasi kita semua untuk terus bekerja untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan progresif untuk kesejahteraan bersama.

Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan. Akibatnya, kritik dan saran yang bermanfaat akan diterima dengan baik. Akhir kata, penulis ingin buku ini menjadi kontribusi penting untuk ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I KONSEP DAN PENTINGNYA KOLABORASI ANTAR AKTOR DAN SEKTOR DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Kolaborasi Antar aktor dan sektor	2
B. Teori Kolaborasi Antar aktor dan sektor	5
C. Mengapa Kolaborasi Antar aktor dan sektor Penting dalam Tata Kelola Pemerintahan?	12
D. Keuntungan dan Tantangan Kolaborasi Antar aktor dan sektor	13
BAB II MODEL-MODEL KOLABORASI ANTAR AKTOR DAN SEKTOR DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	17
A. Model Kemitraan Publik-Swasta (<i>public-private partnership</i>) dalam Tata Kelola Pemerintahan	18
B. Kolaborasi Antar Pemerintah Daerah dan Pusat: Studi Kasus dan Praktik Terbaik	20
C. Peran Masyarakat Sipil dalam Kolaborasi Antar aktor dan sektor	24
BAB III INSTRUMEN KOLABORASI ANTAR AKTOR DAN SEKTOR DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	27
A. Kebijakan dan Regulasi untuk Mendorong Kolaborasi Antar aktor dan sektor	28
B. Pendanaan dan Sumber Daya dalam Kolaborasi Antar aktor dan sektor	32
C. Teknologi dan Inovasi sebagai Pendukung Kolaborasi Antar aktor dan sektor	34
BAB IV STUDI KASUS KOLABORASI ANTAR AKTOR DAN SEKTOR DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	37
A. Kolaborasi Antar Sektor dalam Penanggulangan Bencana	42
B. Kolaborasi Antar Aktor dalam Pembangunan Infrastruktur	43

C. Kolaborasi Antar Sektor dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan	45
BAB V EVALUASI DAN PENGUKURAN KOLABORASI ANTAR AKTOR DAN SEKTOR DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	49
A. Indikator dan Metode Evaluasi Kolaborasi Antar aktor dan sektor	50
B. Pengukuran Dampak Kolaborasi Antar aktor dan sektor	52
C. Hambatan dan Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Kolaborasi Antar aktor dan sektor	54
BAB VI MASA DEPAN KOLABORASI ANTAR AKTOR DAN SEKTOR DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	57
A. Tren dan Perkembangan Terkini dalam Kolaborasi Antar aktor dan sektor	58
B. Kolaborasi Antar aktor dan sektor dalam Era Digital	59
C. Membangun Kapasitas Kolaborasi Antar aktor dan sektor untuk Masa Depan	61
BAB VII CONTOH <i>LESSON LEARNED</i> IMPLEMENTASI TATA KELOLA UMKM	65
A. Contoh Nyata Kolaborasi Antara Desainer, Produsen, Dan Pemerintah Daerah (Fashion Hub Collaboration)	65
B. Kolaborasi Antara Pemerintah, Pelaku Seni Dan Kerajinan, dan Lembaga Pendidikan	67
C. Contoh Nyata Melibatkan Seniman Digital, Lembaga Pendidikan, dan Perusahaan Teknologi Digital Art Incubator	71
DAFTAR PUSTAKA	75
GLOSARIUM	79
PROFIL PENULIS	83

BAB I

KONSEP DAN PENTINGNYA KOLABORASI ANTAR AKTOR DAN SEKTOR DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Selama bertahun-tahun, kolaborasi antar aktor dan sektor dalam tata kelola pemerintahan Indonesia telah berkembang pesat. Ini adalah proses yang mencakup banyak langkah dan perubahan dalam cara pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini adalah gambaran umum dari perubahan ini:

1. Keterlibatan Awal: Saat negara baru dibentuk, sektor lain selain pemerintah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Tanpa banyak masukan dari sektor lain, pemerintah mengeluarkan dan mengambil kebijakan.
2. Kolaborasi Terbatas: Pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah reformasi pada akhir 1990-an, terjadi pergeseran menuju lebih banyak kolaborasi antara pemerintah dan aktor lain seperti organisasi masyarakat sipil. Organisasi donor dan lembaga internasional juga mendorong kolaborasi dalam sektor-sektor tertentu.
3. Pendemorong Eksternal: Tuntutan dan perkembangan eksternal seperti globalisasi dan tuntutan transparansi mendorong pemerintah untuk lebih terbuka terhadap partisipasi aktor-aktor lain seiring dengan pertumbuhan kolaborasi sektor.
4. Pentingnya Partisipasi: Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama antara lembaga pendidikan, bisnis, masyarakat sipil, dan pemerintah semakin diakui sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan yang lebih adil dan inklusif. Proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program mulai memprioritaskan partisipasi publik.
5. Forum Kolaboratif: Banyak forum diskusi, konsultasi, dan diskusi mulai diadakan untuk membahas masalah kritis dan mendapatkan umpan balik dari berbagai sektor. Diskusi multi-stakeholder tentang pengembangan undang-undang tertentu adalah salah satu contohnya.

6. Kemitraan Publik-Privat: Inisiatif kemitraan publik-privat berkembang, membawa investasi swasta untuk mendukung pembangunan. Pemerintah dan sektor swasta semakin bekerja sama dalam proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi.
7. Perkembangan Teknologi: Kemajuan dalam teknologi komunikasi memungkinkan berbagai pihak dan industri untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Media sosial dan platform online sangat membantu masyarakat lebih terlibat dalam tata kelola pemerintahan.
8. Kolaborasi dalam Inovasi: Pengembangan inovasi telah menjadi lebih umum baru-baru ini. Solusi baru di bidang teknologi, energi, dan lingkungan dihasilkan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor bisnis.
9. Penekanan pada Keberlanjutan: Ada peningkatan perhatian pada kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan sosial dan lingkungan.
10. Perkembangan ini disebabkan oleh interaksi antara elemen sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Meskipun masih ada kesulitan untuk mempertahankan konsistensi dan kolaborasi, tren ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintahan dan betapa pentingnya menggabungkan berbagai sumber daya dan pengetahuan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Kolaborasi Antar aktor dan sektor

Kolaborasi antar aktor dan sektor adalah proses kerjasama antara berbagai pihak atau entitas dari berbagai sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan masalah yang sulit, dan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan berkelanjutan.



Sumber : (Damar, 2018)

Gambar 1.1 Ilustrasi Corporate Governance

Para ahli telah memberikan berbagai definisi dari "kolaborasi antar aktor" atau "kolaborasi sektoral" dalam manajemen pemerintah. Berikut adalah beberapa definisi terkait:

1. Chris Ansell dan Alison Gash (2007):
Kolaborasi adalah proses dimana individu atau kelompok yang berbeda dari berbagai sektor pemerintah, swasta, atau masyarakat sipil bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini dilakukan dengan membagi risiko, manfaat, dan tanggung jawab.
2. Paul W. Meek (2010):
Kolaborasi antar aktor dan sektor adalah jenis kerja sama di mana berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda bekerja sama untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi solusi untuk masalah yang rumit.
3. Robert Agranoff (2012):
Aktor-aktor yang berbeda berinteraksi dan terlibat satu sama lain dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik daripada yang dapat dicapai oleh masing-masing pihak secara individual. Ini dikenal sebagai kolaborasi.

4. Ansell dan Torfing (2014):
Kolaborasi adalah jenis kerja sama dimana orang-orang dari berbagai industri bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program untuk menyelesaikan masalah yang sulit dan mendukung tujuan bersama.
5. Bovaird dan Loeffler (2012):
Kolaborasi adalah kerja sama intens antara berbagai organisasi untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai wewenang, keahlian, dan sumber daya.
6. Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012)
Kolaborasi merupakan tindakan bersama dua atau lebih stakeholder dalam mengelola sumber daya sebagai sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan dalam kebijakan publik yang melibatkan badan-badan publik pada berbagai level pemerintahan, private dan masyarakat untuk melaksanakan tujuan publik.

Dengan berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, kolaborasi antar aktor dan sektor mencakup kerja sama lintas sektor yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang rumit, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan mencapai hasil yang lebih baik. Kolaborasi antar aktor dan sektor mengacu pada bentuk kerja sama dan interaksi yang terjadi antara berbagai pihak atau sektor yang berbeda, termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak atau sektor yang berbeda.

1. Partisipan yang Beragam: Kolaborasi dapat melibatkan orang dari berbagai sektor pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga akademik, LSM, organisasi internasional, komunitas lokal, dan individu.
2. Tujuan Bersama: Kolaborasi berfokus pada mencapai tujuan atau hasil bersama yang sulit atau tidak mungkin dicapai jika hanya satu aktor dan sektor yang terlibat.
3. Penyelesaian Masalah: Kolaborasi sering kali dimulai untuk memecahkan masalah atau tantangan.

4. **Pemahaman Bersama:** Kolaborasi melibatkan proses komunikasi dan diskusi yang intens untuk mencapai pemahaman bersama tentang masalah, tujuan, strategi, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
5. **Pembagian Tanggung Jawab:** Orang-orang yang bekerja sama biasanya membagi tugas, peran, dan kontribusi sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka.
6. **Sumber Daya yang Beragam:** Solusi yang lebih komprehensif dan efektif dapat dicapai melalui kontribusi pihak-pihak yang bekerja sama dengan sumber daya seperti uang, teknologi, manusia, atau pengetahuan.
7. **Kepercayaan dan Komitmen:** Kesuksesan kolaborasi memerlukan komitmen dan kepercayaan yang tinggi di antara anggota tim.
8. **Manajemen Konflik:** Perbedaan pendapat atau konflik dapat muncul saat bekerja sama, dan hal-hal ini harus ditangani secara konstruktif untuk mencapai hasil yang diinginkan.
9. **Pembangunan Jaringan:** Kolaborasi dapat membantu membangun jaringan yang kuat antara berbagai industri dan memungkinkan pertukaran informasi dan pengalaman.
10. **Inovasi dan Pembelajaran:** Kolaborasi dapat mendorong inovasi melalui pertukaran ide dan perspektif yang berbeda, serta memperoleh pengetahuan tentang praktik terbaik dari berbagai industri.

Oleh karena itu, kolaborasi antar aktor dan sektor mencakup berbagai aspek, yang menghasilkan kerjasama yang lebih luas dan terintegrasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam hal tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

B. Teori Kolaborasi Antar aktor dan sektor

Berikut ini adalah beberapa teori yang relevan yang mendasari dan menjelaskan konsep kolaborasi antar aktor dan sektor dalam tata kelola pemerintahan:

a. Teori Kemitraan (Partnership Theory):

Menurut teori ini, kolaborasi adalah kemitraan antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dianggap sebagai cara untuk memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Program kemitraan dapat memiliki efek yang lebih besar daripada jika setiap pihak bekerja sendiri. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, perusahaan energi menginvestasikan sumber daya dan teknologi untuk proyek terbarukan, kelompok non-pemerintah menjamin transparansi dan keberlanjutan lingkungan, dan komunitas lokal mendapat manfaat langsung dari proyek.

Salah satu contoh penerapan Teori Kemitraan (Partnership Theory) dapat ditemukan dalam bidang pembangunan berkelanjutan, di mana berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Teori Kemitraan dapat diterapkan dalam dunia nyata misalnya untuk mengatasi tantangan global melalui kerja sama yang kuat antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

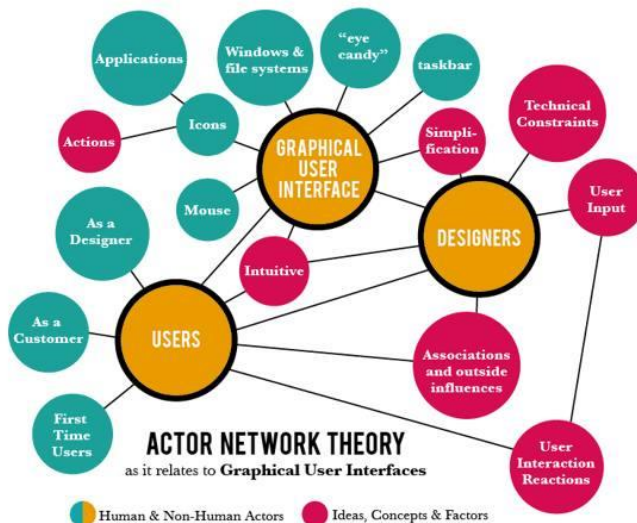


Sumber : (Safitri, 2023)

Gambar 1.2 Ilustrasi Teori Kemitraan (Partnership Theory)

b. Teori Jaringan (Network Theory):

Kolaborasi adalah jenis hubungan antara aktor-aktor dalam jaringan yang kompleks menurut teori jaringan. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, orang-orang ini bekerja sama untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan sumber daya. Misalnya: Dalam pengelolaan krisis atau bencana, berbagai aktor dari berbagai industri bekerja sama dalam jaringan yang terhubung untuk memberikan tanggapan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Ini adalah contoh penerapan Teori Jaringan. Berbagai aktor membentuk jaringan kerjasama yang saling mendukung untuk mengatasi bencana. Setiap aktor membawa kontribusi uniknya ke dalam jaringan ini, dan keterhubungan di antara mereka memungkinkan informasi dan sumber daya untuk bergerak dengan cepat dan efektif. Teori Jaringan membantu dalam memahami bagaimana komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara berbagai aktor ini berkontribusi pada kesuksesan tanggapan terhadap bencana dan upaya pemulihan.



Sumber : (Mustika, 2022)

Gambar 1.3 Ilustrasi Teori Jaringan (Network Theory)

Contoh penerapan Teori Perilaku Organisasi dalam konteks manajemen sumber daya manusia: Perusahaan manufaktur dapat menggunakan Teori Perilaku Organisasi dalam manajemen kinerja untuk membuat lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan keterlibatan karyawan. Metode ini meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan kontribusi positif mereka terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan.

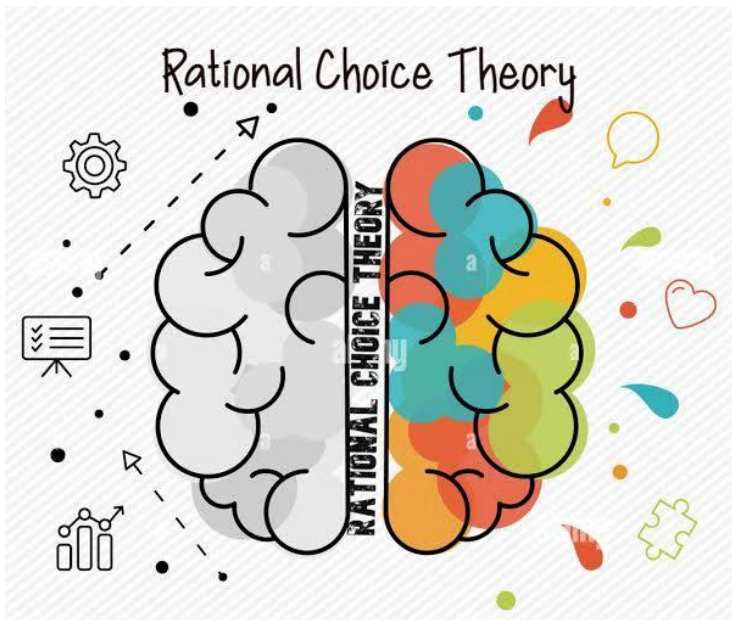


Gambar 1.4 Ilustrasi Teori Perilaku Organisasi (Organizational Behavior Theory)

Teori ini menekankan pada pemilihan tindakan berdasarkan pertimbangan rasional aktor-aktor yang terlibat

dalam kolaborasi. Keputusan untuk berkolaborasi didasarkan pada perhitungan manfaat dan biaya yang diharapkan dari kolaborasi.

Analisis keputusan ekonomi dan sosial adalah contoh penerapan Teori Pilihan Rasional. Analisis keputusan konsumen dapat menjadi lebih terstruktur dan membantu memahami mengapa konsumen memilih produk tertentu. Teori Pilihan Rasional juga dapat membantu produsen dan pemasar memahami preferensi konsumen dan membuat produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen.



Sumber : mikirpedia.com. 2021.

Gambar 1.5 Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

e. Teori Keputusan (Decision-Making Theory):

Teori ini menganalisis bagaimana keputusan dibuat dalam konteks kolaborasi. Ini mencakup elemen seperti pembagian kekuasaan, interaksi sosial, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif.

Teori Pengambilan Keputusan membantu tim manajemen mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang terinformasi secara strategis. Teori ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan analitis untuk menghadapi situasi bisnis yang kompleks.



Sumber : (Riadi, 2018)

Gambar 1.6 Teori Keputusan (Decision-Making Theory)

f. Teori Sistem (Systems Theory):

Menurut teori sistem, kolaborasi adalah bagian dari sistem yang lebih besar, dan hasil kolaborasi dipengaruhi oleh interaksi dan ketergantungan antara komponennya.

Perusahaan dapat membuat lingkungan di mana interaksi, ketergantungan, dan sinergi antar elemen sistem berfungsi secara efektif dengan menerapkan Teori Sistem dalam kolaborasi dalam pengembangan produk inovatif. Hasilnya adalah produk yang lebih inovatif, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan harapan pasar.



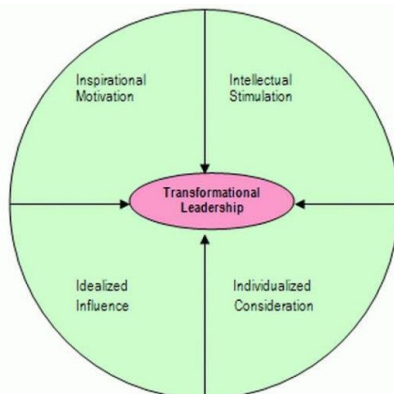
Sumber : (Permata, 2018)

Gambar 1.7 Teori Sistem (System Theory)

g. Teori Kepemimpinan Transformatif (Transformational Leadership Theory):

Teori ini menekankan pentingnya peran pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi para aktor yang bekerja sama untuk menghasilkan inovasi dan perubahan positif.

Contohnya Kepemimpinan Transformatif di Lingkungan Bisnis Teknologi. Perusahaan teknologi dapat menggunakan Teori Kepemimpinan Transformatif untuk menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan merasa terinspirasi dan termotivasi serta memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan dan keberhasilan perusahaan.



Sumber : (Waspodo, 2019)

Gambar 1.8 Teori Transformatif (Transformational Leadership Theory)